

Pembiayaan perubahan iklim dan gender di lapangan

Wawasan intervensi mitigasi dan adaptasi di Indonesia

Nining Liswanti, Ade Tamara dan Houria Djoudi

Pesan utama

- Mekanisme keuangan dan intervensi terkait perubahan iklim harus memprioritaskan kegiatan yang disesuaikan secara lokal dan dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan peran dan kendala yang berbeda dari setiap gender.
- Kementerian yang bertanggung jawab atas aksi iklim memerlukan anggaran yang diberi tanda khusus untuk memungkinkan intervensi menjadi responsif gender. Indikator spesifik gender yang disediakan dalam studi ini dapat mendukung kementerian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aksi iklim untuk memasukkan gender ke dalam sistem anggaran KRISNA ('Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran').
- Intervensi di lapangan perlu mengintegrasikan perempuan dan kaum miskin sebagai unsur penting dalam mencapai tujuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim - dari tahap desain hingga semua tahapan implementasi - dan menerjemahkannya menjadi panduan perencanaan strategis dan operasional pro-masyarakat miskin dan responsif gender.
- Membangun kapasitas kelembagaan para pemangku kepentingan diperlukan di semua tingkat sehingga rencana dan tindakan dapat disinergikan, dan berbagai sumber keuangan dapat digabungkan untuk memastikan hasil gender dan pro-masyarakat miskin yang positif serta keberlanjutan mekanisme pembiayaan jangka panjang.
- Penganggaran responsif gender perlu mengintegrasikan variabel gender dalam pemantauan di semua tingkatan: ini mencakup indikator untuk hasil langsung dan jangka menengah yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk mengubah hubungan gender jangka panjang, sehingga berkontribusi pada perubahan transformasional gender.
- Indikator perlu melampaui penilaian ekonomi biasa, untuk melihat faktor sosial yang terkait dengan proses pengambilan keputusan, penetapan agenda, representasi perempuan dalam lembaga, akses perempuan ke aset dan pasar, dan peningkatan kapasitas.

Pengantar

Adaptasi terkait perubahan iklim dan strategi mitigasi memiliki dampak yang dibedakan berdasarkan gender (Djoudi et al. 2016). Inilah sebabnya mengapa pembiayaan perubahan iklim¹ perlu mengatasi kerentanan yang berbeda serta menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan, terutama bagi perempuan dan kaum miskin (Djoudi dan Brockhaus 2011; Habtezion 2013; PATTIRO 2020). Meskipun ini diakui dan diintegrasikan dalam Kesepakatan Cancun dan Paris (2010; 2015), implementasi pembiayaan perubahan iklim yang pro-masyarakat miskin dan responsif gender masih tertinggal dalam praktiknya. Jika akar masalah kerentanan tidak diperhitungkan,

potensi solusi dapat memperburuk dan tidak mengurangi kesenjangan yang ada, dan membiarkan tantangan perubahan iklim tidak teratasi (MacGregor 2010; Djoudi et al. 2016). Karena kerentanan perubahan iklim, pemerataan, dan kemiskinan terkait erat, terdapat bukti bahwa pembiayaan iklim yang adil dan responsif gender dapat meningkatkan upaya respons iklim dan secara bersamaan mempromosikan pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender (Habtezion 2016).

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan gender pada tahun 1984 dengan meratifikasi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan).

Hal ini ditindaklanjuti dengan Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 2004–2009, sebuah kebijakan yang menjadi landasan bagi rencana pembangunan nasional jangka panjang (RPJPN 2005–2025) yang berkomitmen untuk kesetaraan gender dan kesesuaian agenda pembangunan nasional dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 5 (UNDP nd).

Kajian yang mendasari info singkat ini berfokus pada adaptasi dan aksi mitigasi iklim di tingkat daerah di Indonesia. Aksi iklim didefinisikan sebagai proyek dan program untuk memitigasi atau beradaptasi dengan perubahan iklim di tingkat rumah tangga, desa atau kabupaten. Tindakan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, item anggaran yang ditandai dalam sistem Penandaan Anggaran Iklim Indonesia (CBT) sebagai tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam studi ini kami mengadopsi pendekatan multilevel untuk menilai apakah pembiayaan iklim dan aksi iklim berkontribusi pada perubahan transformatif gender jangka panjang dan manfaat bersama yang pro-masyarakat miskin di lapangan. Kami mengadaptasi kerangka kerja konseptual Gender Analysis Pathway (GAP) (Bappenas dan KNPP 2007) dan Gender Transformative Change (GTC) (Hillenbrand et.al. 2015) untuk merancang kajian ini dan mengembangkan indikator yang dapat mendukung integrasi gender di masa depan.

Lokasi penelitian

Dua aksi iklim dipilih; keduanya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat daerah:

i. i. Program agroforestri yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo, BPDASHL SOP, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - ini ditandai sebagai mitigasi iklim. Pada 2017, SOP BPDASHL menerima sekitar Rp 7,2 miliar untuk intervensi agroforestri; Program agroforestri dilaksanakan di 45 desa di seluruh DAS untuk sekitar 25 ha di setiap desa, dengan alokasi anggaran Rp 160 juta per desa (~ USD 11.000). Aliran anggaran 'bottom-up' berdasarkan dialog tingkat provinsi dan desa. Penerima manfaat termasuk laki-laki, perempuan, muda, tua dan miskin yang menjadi anggota kelompok tani.

ii. Program sumur artesis yang dijalankan oleh Badan Geologi Pusat Geologi Air Tanah dan Lingkungan di Bandung, di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) - ini dianggap sebagai adaptasi iklim. Menargetkan 500 lokasi di Indonesia, program tersebut merupakan salah satu program prioritas nasional. ESDM bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan air tanah, karena 59% penduduk bergantung pada sumur untuk air minum. Air tanah semakin berperan penting sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya di daerah rawan bencana atau daerah yang sulit mendapatkan air. Karena itu, pemerintah wajib untuk menjamin hak masyarakat atas air bersih dengan membangun sumur bor untuk masyarakat sekitar. Aliran anggaran dari atas ke bawah; perusahaan disubkontrakan di tingkat nasional dan sumur yang dibangun diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Penerima manfaat termasuk laki-laki, perempuan, tua, muda dan miskin dalam satu komunitas desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui desk review, wawancara informan kunci dan diskusi kelompok terfokus. Ini meliputi total 21 wawancara informan kunci (13 laki-laki dan 8 perempuan), dan 8 diskusi kelompok terfokus, dengan 4 kelompok laki-laki (22) dan 4 kelompok perempuan (20). Untuk Program agroforestri, tiga desa di Jawa Tengah dipilih untuk mewakili geografi berbeda di mana proyek agroforestri sedang dilaksanakan. Desa-desa tersebut berada di kawasan rawan bencana / longsor (Lokasi 1), zona resapan dan resapan air (Lokasi 2), dan area di sepanjang tepi sungai (Lokasi 3). Untuk program sumur artesis, dipilih satu desa (Lokasi 4) di Lombok Timur, dimana sumur artesis dibangun pada tahun 2018 (lihat juga Liswanti dkk. 2020).

Pembelajaran: Aksi iklim di lapangan

Aksi iklim di dua proyek subnasional telah memberikan manfaat mitigasi dan adaptasi. Proyek agroforestri/wanatani dilaksanakan pada lahan yang tadinya tidak produktif yang rawan longsor dan erosi. Spesies pohon yang dipilih tidak hanya berkontribusi pada penyerapan karbon, tetapi juga retensi tanah, sehingga mengurangi bencana seperti erosi, tanah longsor dan banjir. Sumur artesis juga membantu masyarakat sekitar melewati musim kemarau. Fungsinya yang tidak hanya menyediakan air minum bagi manusia tetapi juga ternak, membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Menghubungkan adaptasi dan perencanaan mitigasi adalah kunci untuk meningkatkan manfaat anggaran dan intervensi, terutama dalam sektor, proyek dan/atau daerah yang sama. Ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan hasil mitigasi (yaitu sekuestrasi karbon) dari intervensi adaptasi, dan sebaliknya, dengan mempertimbangkan setiap manfaat adaptasi yang dapat meningkatkan strategi adaptasi masyarakat lokal ketika merencanakan intervensi mitigasi. Contohnya, intervensi mitigasi yang dikaji di sini terdiri dari penanaman pohon untuk penyerapan karbon, tetapi pada saat yang sama, intervensi ini melindungi masyarakat lokal dari longsor. Mensinergikan manfaat adaptasi dan mitigasi di tingkat yurisdiksi atau lanskap akan membuat pembiayaan aksi iklim lebih efisien, karena umumnya berbagai program dan tindakan yang terjadi di tingkat yurisdiksi dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yang sama.

Kuncinya adalah menggabungkan dan mensinergikan berbagai mekanisme dan aliran pembiayaan di tingkat lokal. Dalam proyek adaptasi, aktor lokal mampu untuk menciptakan sinergi antar program yang berbeda, meskipun pembiayaan untuk program tersebut berasal dari aliran yang berbeda. Misalnya, kepala desa menggunakan Dana Desa untuk meningkatkan aset petani dengan memberikan sapi kepada kelompok tani; Kelompok-kelompok ini kemudian dapat mengambil persediaan air untuk ternak dari sumur artesis. Para petani pemakai air sumur memberikan kontribusi bulanan untuk memelihara sumur, sehingga meningkatkan keberlanjutan intervensi ini. Memanfaatkan dana yang berbeda, kepemimpinan pemangku kepentingan dan modal sosial masyarakat di tingkat lokal, dapat menciptakan sinergi dan meningkatkan keberlanjutan aksi iklim.

Meskipun pengentasan kemiskinan jelas diprioritaskan di semua proyek iklim yang diteliti, kesetaraan gender belum mendapat perhatian yang sepadan. Program mitigasi perubahan iklim (agroforestri) dan adaptasi (sumur artesis) termasuk dalam program prioritas nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana dinyatakan dalam rencana 2015-2020. Tujuan utama dari rencana ini adalah: (1) untuk merehabilitasi kawasan lahan utama yang

merupakan lahan hutan milik masyarakat atau non-kawasan hutan (mitigasi); dan (2) menyediakan sumber daya air bersih di daerah yang tidak atau memiliki akses terbatas terhadap air, atau di daerah yang rawan kekeringan (adaptasi), dengan harapan dapat mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dianggap lebih prioritas daripada kesetaraan gender. Ini berarti bahwa fokusnya adalah pada peningkatan semua mata pencaharian melalui intervensi agroforestri, seperti halnya penyediaan sumber daya air untuk konsumsi dan pekerjaan rumah tangga memiliki fokus khusus pada orang miskin, tanpa adanya perbedaan dampak yang direncanakan untuk kelompok sosial yang berbeda, atau laki-laki dan perempuan.

Hasil diskusi kelompok terfokus dan wawancara semi-terstruktur mengungkapkan bahwa tidak ada analisis gender yang diintegrasikan dalam anggaran atau rancangan inisiatif adaptasi dan mitigasi yang dikaji. Rancangan awal proyek agroforestri (mitigasi) berfokus pada dampak lingkungan bagi masyarakat, dengan analisis singkat aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Demikian pula, pembuatan sumur artesis (adaptasi) memprioritaskan daerah tanpa atau dengan akses terbatas ke air, atau daerah rawan kekeringan. Padahal beberapa dampak positif ditemukan di proyek adaptasi tersebut dalam hal pengurangan beban kerja perempuan, dampak ini merupakan hasil gender positif yang tidak disengaja; tujuan awal proyek adalah untuk menyediakan air bagi masyarakat luas dan perempuan tidak secara khusus dipertimbangkan dalam rancangan atau implementasi. Meskipun diskusi kami di lapangan mengungkapkan bahwa masyarakat memandang bahwa, "apa yang baik untuk masyarakat itu baik untuk perempuan," hasil kami menunjukkan bahwa kenyataannya tidak selalu demikian.

Beban kerja yang meningkat mempengaruhi kerentanan perempuan; sebagian besar perempuan bertanggung jawab untuk kegiatan produktif dan reproduksi, baik di rumah maupun di lapangan. Hasil kami menunjukkan bahwa dalam proyek mitigasi, kegiatan intervensi meningkatkan beban kerja perempuan. Hal ini menjadi masalah terutama ketika pohon yang ditanam tidak meningkatkan pendapatan perempuan secara langsung atau memberi mereka akses ke sumber daya,

proses pengambilan keputusan dan program peningkatan kapasitas. Banyak perempuan yang bertanggung jawab atas pohon yang ditanam di lapangan tidak benar-benar memahami hasil jangka panjang dari intervensi tersebut; mereka lebih menganggap hal tersebut suatu kerugian, karena beban kerja yang meningkat dan kesulitan yang muncul karena memiliki pohon tambahan di ladang mereka. Meskipun intervensi pada awalnya mungkin menghasilkan peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat, kurangnya pelibatan perempuan dalam program tersebut, dan khususnya dalam pengembangan kapasitas, menimbulkan risiko terhadap tujuan intervensi dalam jangka panjang. Dalam proyek sumur artesis, penurunan beban kerja untuk mengambil air tidak selalu mengurangi kerentanan. Mengandalkan anggota keluarga lainnya mengambil air berarti perempuan menjadi sangat bergantung pada kehadiran anggota keluarga tersebut di rumah. Berbagai temuan menunjukkan perspektif yang berbeda dan kompleksitas pertimbangan gender yang perlu ditangani intervensi perubahan iklim, serta kebutuhan analisis gender yang berbeda dan spesifik konteks dalam intervensi perubahan iklim.

Anggaran untuk mencakup intervensi responsif gender juga harus mencakup pemantauan yang dibedakan berdasarkan gender, di semua tingkatan. Ini perlu mencakup hasil langsung dan jangka menengah yang bertindak sebagai batu loncatan, menggeser hubungan gender jangka panjang dan karena itu mencapai perubahan transformasional gender. Indikator terukur harus melampaui penilaian ekonomi biasa, untuk mencakup faktor sosial yang terkait dengan proses pengambilan keputusan, representasi perempuan di semua lembaga, akses mereka ke aset dan pasar, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Rangkuman indikator yang relevan untuk kedua studi tersebut, dilaborasi menggunakan kerangka konseptual Gender Transformative Change (GTC) (Hillenbrand et al. 2015)

Indikator	Contoh dari studi	Pertanyaan untuk menjawab indikator, dalam intervensi di masa depan
Pendapatan	Indikator 1: Perbedaan upah berdasarkan gender AF: upah berbeda menurut gender, laki-laki menerima pendapatan lebih tinggi	Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh pendapatan yang sama dari produk dan aset yang disediakan oleh intervensi?
Tenaga kerja dan beban kerja	Indikator 2: Perubahan dalam penggunaan waktu dalam aktivitas tertentu AF: menanam pohon menghasilkan beban kerja yang lebih tinggi bagi perempuan, karena pemeliharaan pohon dilakukan oleh perempuan. SA: perempuan mengalami penurunan beban kerja, karena pengambilan air dilakukan oleh laki-laki (anak, lansia, suami), kecuali janda atau perempuan lajang.	Apakah kegiatan terkait dengan intervensi mengubah pembagian kerja di tingkat rumah tangga atau masyarakat? Apakah beban kerja perempuan bertambah atau berkurang? Jika berkurang, bagaimana perempuan menggunakan waktu yang mereka peroleh?
Aset	Indikator 3: Kemampuan untuk mengklaim output dan pendapatan yang dihasilkan oleh aset AF: Pendapatan yang diperoleh dari produk pohon ditujukan untuk memberi manfaat bagi keluarga; kemampuan perempuan untuk mengklaim pendapatan ini bergantung pada kemauan dan kemampuan laki-laki untuk berbagi pendapatan ini dengan perempuan.	Apakah semua manfaat dan aset yang dihasilkan oleh intervensi dapat diakses secara setara oleh anggota masyarakat yang berbeda (perempuan dan laki-laki)?
	Indikator 4: Proporsi perempuan dengan laki-laki dengan akses ke aset tersebut (fisik, sosial, ekonomi) yang merupakan kunci ketahanan AF: Buah pohon biasanya dikumpulkan oleh perempuan dan aren dikumpulkan oleh laki-laki (karena letaknya jauh di dalam hutan).	Berapa proporsi laki-laki dan perempuan yang memiliki akses ke aset yang merupakan kunci terhadap kapasitas dan ketahanan adaptif dalam menghadapi krisis (iklim atau non-iklim)? Apakah intervensi meningkatkan mekanisme akses tersebut atau menguranginya?
	Indikator 5: Produk agroforestri yang merupakan kunci ketahanan AF: Pepohonan melindungi rumah di ladang dari tanah longsor dan erosi secara merata untuk semua anggota masyarakat (laki-laki dan perempuan).. AF: Pohon buah-buahan (untuk Lokasi 1 dan Lokasi 2) memperoleh manfaat ekonomi tetapi laki-laki umumnya bertanggung jawab untuk menjual buah.	Bagaimana aset tersebut mempengaruhi ketahanan masyarakat terhadap kejadian di masa depan? Apakah dampaknya sama atau berbeda menurut gender, usia, dll?
	Indikator 6: Aturan gender yang mengatur akses ke aset dan pasar produktif SA: Tidak ada aturan gender terkait akses ke air. AF: Pembatasan spesifik gender lokal untuk kepemilikan lahan (sebagian besar lahan dimiliki oleh laki-laki)..	Apakah aturan gender yang mengatur akses ke aset dan pasar produktif? Apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap lahan dan peluang pasar?

Tabel 1. Lanjutan

Indikator	Contoh dari studi	Pertanyaan untuk menjawab indikator, dalam intervensi di masa depan
Pengetahuan, keterampilan dan kesadaran	Indikator 7: Tingkat pelatihan atau jejaring di kalangan perempuan lokal, dibandingkan dengan laki-laki	Dalam kedua intervensi tersebut, perempuan jarang mengikuti banyak sesi pelatihan atau pertemuan masyarakat terkait intervensi.
Apakah tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam organisasi masyarakat? Bagaimana karakteristik partisipasi perempuan? (Hanya kehadiran, aktif, proaktif?)		
Agenda	Indikator 8: Meningkatnya partisipasi dalam organisasi masyarakat	Perempuan tidak diajak berkonsultasi atau menjadi bagian dari program pengembangan kapasitas di kebanyakan lokasi, dalam kedua intervensi tersebut.
Apakah intervensi meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga atau organisasi lokal?		
	Indikator 8: Penerimaan sistem atas hak dan inklusi perempuan	AF: Keterlibatan perempuan dalam program terkait dengan kepemilikan mereka atas tanah, yang sebagian besar dimiliki oleh laki-laki.
Bagaimana partisipasi atau inklusi perempuan menurut persepsi mereka sendiri, anggota masyarakat lainnya dan oleh pemangku kepentingan lainnya?		
Sumber daya internal dan psikologis	Indikator 10: Harga diri, efikasi diri dan kesejahteraan psikologis	AF: program tidak berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri perempuan, karena mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas atau pemberdayaan..
Bagaimana intervensi mempengaruhi harga diri dan kesejahteraan perempuan?		
	Indikator 11: Kemandirian	AF: program dapat berkontribusi pada kemandirian keuangan perempuan ketika pohon mulai menghasilkan buah.
Sejauh mana intervensi tersebut mampu menciptakan kemandirian bagi perempuan?		
	Indikator 12: Kemampuan untuk mengubah sesuatu secara kolektif dalam masyarakat	AF: Di satu desa, laki-laki dan perempuan bekerja sama untuk mempertahankan hasil yang mereka capai.
Sejauh mana intervensi mampu menciptakan koherensi kolektif dan sosial dalam masyarakat?		
	Indikator 13: Kohesi kelompok, kepercayaan dan inklusivitas	AF: Pelaksanaan proyek agroforestri dilakukan secara individu, namun pencapaiannya dianggap pencapaian kelompok. Para petani mengakui manfaat program perlindungan terhadap tanah longsor dan peningkatan produktivitas lahan.
Bagaimana intervensi mempengaruhi modal sosial dan inklusivitas dalam masyarakat?		
Keterwakilan dan upaya kelompok	Indikator 14: Persepsi perempuan bahwa kepentingan mereka terwakili	AF: Sebagian besar perempuan di tiga desa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan seputar proyek agroforestri. Di satu desa, perempuan diminta pendapat secara tidak langsung oleh suaminya, tetapi spesies tanaman yang dipilih adalah yang lebih disukai oleh laki-laki. Di satu lokasi, perempuan menghadiri pertemuan tetapi tetap diam selama pertemuan karena batasan sosial dan budaya gender.
Apakah perempuan merasa kepentingan dan kebutuhan mereka diwakili dalam desain dan implementasi intervensi?		
	Indikator 15: Persepsi pencapaian kelompok dan pencapaian yang diharapkan di masa depan	AF: Program agroforestri/wanatani dikoordinasikan oleh ketua kelompok tan, namun pelaksanaannya dilakukan secara individu.
Bagaimana intervensi mempengaruhi kemampuan perempuan untuk mewujudkan pencapaian kelompok? Bagaimana prospek pencapaian di masa depan?		

Tabel 1. Lanjutan

Indikator	Contoh dari studi	Pertanyaan untuk menjawab indikator, dalam intervensi di masa depan
Indikator 16: Kohesi kelompok, kepercayaan dan inklusivitas	AF: Tidak ada peningkatan nilai kelompok, karena implementasi dilakukan secara individu. Kelompok tani hanya mendistribusikan sumber daya yang disediakan pemerintah.	Bagaimana intervensi mempengaruhi modal sosial dan inklusivitas dalam masyarakat?
Indikator 17: Efektivitas kepemimpinan kelompok	AF: Kepemimpinan kelompok dianggap efektif oleh sebagian besar responden kami di ketiga desa. Melalui kelompok tani, petani menerima pengetahuan berharga tentang agroforestri.	Apakah kualitas kepemimpinan yang membuat intervensi lebih setara gender?
Indikator 18: Evolusi aturan dan hukum kelompok	Tidak ada aturan dan sanksi yang dikenakan di kedua program tersebut	Apakah intervensi mempengaruhi aturan dan nilai di masyarakat? Apakah aturan baru lebih inklusif?
Indikator 19: Pertanyaan, keluhan dan permintaan dari perempuan kepada dewan desa (mekanisme pengaduan)	Dalam kedua intervensi tersebut, struktur tradisional (yaitu kepala desa) bertanggung jawab atas mekanisme pengaduan. Di beberapa lokasi AF, perempuan mengeluh, melalui suaminya, tentang pohon yang mengganggu aktivitas mereka di ladang dan meningkatkan beban kerja mereka.	Apakah ada mekanisme pengaduan untuk menangani konflik? Apakah perempuan memiliki akses ke mekanisme tersebut? Apa yang terjadi jika perempuan membuat pengaduan?
Indikator 20: Perluasan ambisi kelompok; tindakan yang diprakarsai oleh kelompok	AW: Ada rencana untuk merubah pengelolaan sumur bor menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PAMDES) di bawah pemerintahan desa. Tidak jelas apakah integrasi perempuan akan ditingkatkan.	Apakah rencana dan inisiatif yang diprakarsai oleh kelompok lokal? Apakah hal ini telah diprakarsai melalui intervensi?
Indikator 21: Keragaman representasi dan kepemimpinan	Secara umum, perempuan terlibat dalam struktur kepemimpinan pemerintah daerah, namun tidak dalam desain dan implementasi kedua intervensi yang dikaji.	Siapa yang terwakili dalam struktur kepemimpinan dan siapa yang tidak (termasuk gender, kelas, usia, kelompok etnis)?

Sebuah narasi kunci seputar gender dan kemiskinan diamati di seluruh lokasi studi: Mengurangi kemiskinan setiap orang adalah tujuan yang mulia untuk memastikan martabat dasar manusia. Kesetaraan gender adalah tentang perempuan yang menuntut hak-haknya. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan menjadi prioritas di atas kesetaraan gender.

Narasi ini mengabaikan fakta bahwa gender dan kemiskinan saling terkait - kita tidak dapat mengurangi kemiskinan masyarakat jika setengah dari populasi lebih menderita dari yang lain. Temuan kami menunjukkan dampak yang berbeda menurut gender pada kegiatan mitigasi dan adaptasi. Program-program ini dikembangkan dengan asumsi bahwa perempuan adalah bagian masyarakat, namun karena setiap perempuan terdampak secara berbeda (misalnya oleh kemiskinan, disabilitas, status perkawinan), isu gender dan kerentanan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan dan desain proyek agar dapat secara efektif mengatasi kemiskinan. Ada perbedaan gender yang jelas dalam kegiatan pertanian; meskipun laki-laki melakukan pekerjaan fisik, beban kerja perempuan terus meningkat, dan tidak ada pengembangan kapasitas untuk perempuan. Hal ini mengakibatkan pemahaman yang terbatas tentang pentingnya pohon untuk mencegah bencana, dan perempuan akan menebang pohon jika mengganggu tanaman mereka. Dalam kegiatan adaptasi, beban kerja berbeda di antara perempuan. Meski perempuan mendominasi di ranah domestik, namun perempuan yang memiliki suami atau anak mengandalkan mereka untuk mengambil air dari sumur, berbeda dengan para janda atau perempuan lajang yang mengambil air sendiri.

Perempuan dan kelompok miskin memiliki kesempatan yang terbatas untuk menyuarakan kepentingan mereka dan mempengaruhi pengelolaan dan penggunaan dana. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan intervensi di tingkat masyarakat, seperti yang ditunjukkan pada Kotak 1 dan 2.

Kotak 1. Mitigasi: Inklusi gender membantu menghindari kesalahan adaptasi dan mencapai tujuan mitigasi

Proyek agroforestri yang kami kaji menanam pohon di lahan pertanian milik pribadi untuk menyerap karbon dan memberikan manfaat mata pencaharian tambahan. Perempuan bertanggung jawab atas sebagian besar kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pemanenan dimana pohon-pohon ini ditanam. Namun mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan dan desain proyek agroforestri, termasuk pemilihan lokasi dan spesies. Sesi pengembangan kapasitas dan sosialisasi berikutnya menargetkan laki-laki, yang dianggap sebagai 'petani'. Meski diberi tanggung jawab, perempuan tidak memiliki pengetahuan tentang pohon dan atau alasan perubahan iklim di balik aksi tersebut. Kegagalan mengintegrasikan perempuan dalam rancangan intervensi, dan kurangnya peningkatan kapasitas yang menargetkan perempuan, mengakibatkan sedikit insentif bagi perempuan untuk merawat pohon, yang mengakibatkan pohon mati di banyak ladang. Kurangnya integrasi gender dengan demikian menghambat keberlanjutan jangka panjang aksi perubahan iklim, karena tujuannya adalah melindungi ladang dari erosi dan tanah longsor.

Kotak 2. Adaptasi: Manfaat intervensi bagi perempuan dan kaum miskin

Proyek sumur artesis diusulkan bersama oleh pemerintah provinsi dan ketua kelompok tani dengan pendekatan bottom-up untuk pelaksanaan proyek, namun perempuan dan kaum miskin masih dikecualikan dari pengambilan keputusan. Proyek sumur artesis, yang dirancang untuk mencapai tujuan adaptasi, memberikan beberapa manfaat bagi perempuan dan kaum miskin, namun, perempuan tidak diajak berkonsultasi selama pelaksanaan proyek. Perempuan dan kaum miskin mendapat manfaat dari sumur, karena mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan air, tetapi mereka tidak dilibatkan dalam keputusan yang dapat meningkatkan efektifitas proyek ini, misalnya tentang lokasi dan pemeliharaan sumur. Akses tergantung pada kemampuan untuk membawa air dari sumur ke rumah, yang mengecualikan manfaat bagi rumah tangga termiskin (terutama orang tua, dan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan).

Rekomendasi

Gender, perubahan iklim dan kerentanan yang saling beririsan

Adaptasi perubahan iklim dan intervensi mitigasi harus dilakukan berdasarkan penilaian kerentanan gender yang menyeluruh, meliputi data yang dipilah menurut gender tentang beban kerja, pendapatan, akses ke aset dan tanah, dan representasi dalam proses pengambilan keputusan. Pelingkupan partisipatif, untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus perempuan, laki-laki dan kelompok rentan sehingga memastikan program yang responsif gender, adalah kunci untuk menentukan dampak iklim dan non-iklim yang dibedakan berdasarkan gender, dan untuk merancang strategi adaptasi yang meningkatkan kapasitas kelompok rentan. Ketersediaan data terpilah berdasarkan gender untuk menilai responsivitas gender dan dampak intervensi yang dibedakan berdasarkan gender sangat penting dalam proses ini.

Pengembangan kapasitas

Program peningkatan kapasitas yang menargetkan petani perlu memastikan bahwa kelompok sasaran representatif dan setara gender, sehingga dapat memberi manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki. Membangun kapasitas kelembagaan para pemangku kepentingan diperlukan untuk dapat mensinergikan aksi dan rencana, menggabungkan berbagai sumber pembiayaan untuk meningkatkan keberlanjutan aksi, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang mekanisme pembiayaan di tingkat daerah dan lokal.

Anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Kementerian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program prioritas nasional tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu mengintegrasikan proyek sumur artesis dan proyek wanatani ini ke dalam sistem penandaan anggaran iklim responsif gender yang telah ada. Kementerian yang menyediakan anggaran responsif gender perlu mengembangkan pedoman untuk penganggaran iklim responsif gender,

untuk memastikan agar kementerian lebih memahami manfaat penandaan anggaran di sistem anggaran KRISNA ('Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran'). Koordinasi harus ditingkatkan antara kementerian pelaksana program - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional - khususnya untuk anggaran iklim Indonesia, anggaran responsif gender, dan proses pengembangan Jalur Analisis Gender (Gender Analysis Pathways) dan Laporan Anggaran Gender (Gender Budget Statements).

Acknowledgment

This study is developed under the UNDP Sustainable Development Financing (SDF) project supported by UNDP Strengthening the Governance of Climate Change Finance (GCCF) and UNDP-UNEP Poverty Environment Action (PEA) programmes, and co-financed by CGIAR's Forest Trees and Agroforestry (FTA) CRP on Gender. Special thanks to Muhammad Didi Hardiana, Joan Manda, Debi Nathalia, Aghnia Dima Rochmawati, Charlotte German, and Evelyne Batamuliza from UNDP for their support, insightful comments and guidance. Thanks to Bimbika Sijapati Bassnett and Shintia Arwida, who were instrumental in launching this research. We are also grateful to BAPPENAS, Ministry of Finance (Kemenkeu), Ministry of Women Empowerment and Child Protection (KPPPA), Ministry of Environment and Forestry (KLHK), Ministry of Energy and Mineral Resources (Kemen ESDM), Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kemendes PDTT), and PATTIRO for participating and providing input during our inception and validation workshops. Last but not least, we thank the 23 key informant interviewees for sharing their inputs, information and perceptions.

References

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional and [KNPP] Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan].

2007. *Gender analysis pathways (GAP): Alat analisis gender untuk perencanaan pembangunan*. Jakarta, Indonesia: Bappenas and KNPP. https://www.bappenas.go.id/files/5913/8146/3811/gap-revisi-2007--alat-analisis-gender__20130716120956__0.pdf

Djoudi H and Brockhaus M. 2011. Is adaptation to climate change gender neutral? Lessons from communities dependent on livestock and forests in northern Mali. *International Forestry Review* 13(2):123–133.

Djoudi H, Locatelli B, Vaast C, Asher K, Brockhaus M and Basnett Sijapati B. 2016. Beyond dichotomies: Gender and

intersecting inequalities in climate change studies. *Ambio* 45(S3):248–262. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0825-2>

Habtezion S. 2013. *Climate funds update: Gender and climate finance*. UNDP Policy Brief 5. New York, USA: United Nations Development Programme (UNDP). <https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/PB5-AP-Gender-and-Climate-Finance.pdf>

Habtezion S. 2016. *Gender and climate change: Gender and climate finance*. UNDP Policy Brief 5. Gender and climate finance.: New York, USA: United Nations Development Programme (UNDP). <https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/UNDP%20Gender%20and%20Climate%20Finance%20Policy%20Brief%205-WEB.pdf>

Hillenbrand E, Karim N, Mohanraj P and Wu D. 2015. *Measuring gender-transformative change: A review of literature and promising practices*. Working Paper. Atlanda, USA: CARE.

Liswanti N, Tamara A and Djoudi H. 2020. *Leveraging climate finance for gender equality and poverty reduction: A guidance for sector pilot projects to better contribute towards gender transformative change and adaptive capacity of poor women and men in select subnational sites (WP2)*. Project Report. Bogor, Indonesia: CIFOR.

MacGregor S. 2010. A stranger silence still: The need for feminist social research on climate change. *The Sociological Review* 57(2):124–140.

PATTIRO. 2020. *Kajian pembiayaan perubahan iklim yang responsif gender*. Jakarta, Indonesia: PATTIRO. Accessed 1 December 2020. <http://pattiro.org/2020/05/kajianpembiayaan-perubahan-iklim-yang-responsif-gender/> [UNDP] United Nations Development Programme. nd. *Gender equality: National ownership*. New York, USA: UNDP. Accessed 1 December 2020. <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/gender-equality.html>



RESEARCH PROGRAM ON
Forests, Trees and
Agroforestry

This research was carried out by CIFOR as part of the CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA). FTA is the world's largest research for development program to enhance the role of forests, trees and agroforestry in sustainable development and food security and to address climate change. CIFOR leads FTA in partnership with Bioversity International, CATIE, CIRAD, INBAR, ICRAF and TBI.

FTA's work is supported by the CGIAR Trust Fund: cgiar.org/funders/



cifor.org

forestsnews.cifor.org



Center for International Forestry Research (CIFOR)

CIFOR advances human well-being, equity and environmental integrity by conducting innovative research, developing partners' capacity, and actively engaging in dialogue with all stakeholders to inform policies and practices that affect forests and people. CIFOR is a CGIAR Research Center, and leads the CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA). Our headquarters are in Bogor, Indonesia, with offices in Nairobi, Kenya; Yaounde, Cameroon; Lima, Peru and Bonn, Germany.

